



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERIKANAN
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Renja PD berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Semoga Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang perikanan.

Liwa, Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Kamaludin, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19660405 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
IV. PENUTUP	30

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun.

Perikanan merupakan salah satu sektor prospektif dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi Perikanan ini tersebar di 15 kecamatan yang terdiri atas 3 bidang pokok yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Oleh karena itu, program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dan sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan pembangunan yang tertuang dalam dokumen yang terpadu, terarah dan partisipatif dalam pembangunan;
2. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
3. Sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Kabupaten Lampung Barat;
4. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Nilai produksi perikanan	Nilai Produksi Perikanan	255.241.500.000,-

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 (tiga) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp. 4.116.599.968,- (Empat milyar seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) teralisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.001.262.794,- atau 48,61 Persen. Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 15 Subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen sebagai berikut :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 36,37 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
2. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
5. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

6. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
7. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
8. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
9. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
10. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

11. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesinm Lainnya realisasi fisik/output sebesar 50 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
12. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran;
13. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil realisasi fisik/output sebesar 60,78 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
14. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil realisasi fisik/output sebesar 75,86 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
15. Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan realisasi fisik/output sebesar 20 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen

karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Perikanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Analisis kinerja Dinas Perikanan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Lampung Barat meliputi kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat yaitu penangkapan ikan di perairan umum yang meliputi perairan umum danau, sungai, cek dam, rawa dan genangan air lainnya. Sedangkan untuk potensi kegiatan budidaya ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat meliputi kegiatan budidaya di perairan umum, budidaya kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah).

Peningkatan produksi usaha budidaya ikan dan penangkapan ikan diharapkan setiap tahunnya meningkat

karena Dinas Perikanan telah melaksanakan beberapa pelatihan – pelatihan kepada pembudidaya dan nelayan selain daripada itu Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam peningkatan konsumsi ikan perkapita Dinas Perikanan juga meningkatkannya melalui kegiatan – kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat, dan pelatihan – pelatihan pengolahan produk perikanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah :

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas dan daya saing usaha perikanan belum optimal;
2. Pengetahuan pelaku usaha perikanan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah;

3. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan/ konservasi bidang perikanan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas perikanan selalu berusaha untuk mencapai program/kegiatan yang telah direncanakan dengan teralisasinya semua program/kegiatan seperti Kegiatan usaha di bidang perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat antara lain kegiatan penangkapan ikan di perairan umum, budidaya ikan di perairan umum, budidaya ikan di kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah). Kegiatan usaha penangkapan ikan perairan umum di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari penangkapan ikan di danau, sungai, rawa, cekdam dan genangan air lainnya yang ter sebar di seluruh kecamatan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 produksi penangkapan ikan sebesar 374,1 ton atau 1,25% dari target produksi tangkap sebesar 298,4 ton. Sedangkan untuk produksi usaha budidaya pembesaran ikan sebesar 2.328,6 ton atau mencapai 95 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2.447,0 Ton. Dan produksi usaha budidaya perbenihan ikan sebesar 13.982.828 Ekor atau mencapai 95% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 14.659.618 ekor.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh Dinas perikanan selama ini adalah program/kegiatan dari usulan masyarakat dan untuk masyarakat yang telah disurvei dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan, untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat diperlukan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD. Sehingga pada Tahun 2023 Dinas perikanan mengajukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang langsung menyetuh kepada masyarakat sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Dinas Perikanan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Tahun 2023	Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kinerja Tahun 2023	Dalam %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,78	-	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	28 Dokumen	11 Dokumen	50 %
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen	36%
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang	100%
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Dokumen	0%
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6 Dokumen	50%
1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum	6 paket	4 paket	66%
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0
1.5.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
1.5.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.5.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0	0	0
1.6.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	0	0	0
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 sub organisasi	4 sub organisasi	100%
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	100%
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	100%
1.8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	2 Unit	50%
1.8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	4 Unit	0	0
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	1%	1,25%	125%
2.2.	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dan menerima bantuan	255 Orang	155 Orang	61%
2.2.1.	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	255 Orang	155 Orang	61%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya	5%	6%	120%
3.2.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok usaha perikanan yang mengikuti pengembangan Kapasitas dan menerima bantuan	61 Kelompok	27 kelompok	44%
3.2.1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	36 Kelompok	22 kelompok	61 %
3.2.4.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	5 kelompok	20%

Target dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub

Dinas Perikanan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Keunagan Tahun 2023	Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Keunagan Tahun 2023	Dalam %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	3.043.761.498,-	1.523.716.008,-	50,05
1.1.	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	38.130.000,-	19.560.000,-	51,30
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.182.000,-	7.138.800,-	50,34
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.025.000,-	2.022.800,-	50,26
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.885.000,-	2.644.900,-	68,08
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3.820.000,-	2.231.000,-	58,40
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3.573.000,-	827.000,-	23,15
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	3.645.000,-	2.027.800,-	55,63

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	2.667.800,-	53,36
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2.480.501.248,-	1.335.277.596,-	53,83
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.471.651.248,-	1.332.369.096,-	53,91
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.520.000,-	0	0
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.330.000,-	1.837.500,-	55,18
1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,-	1.071.000	53,55
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.296.100,-	4.762.000,-	65,27
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.296.100,-	4.762.000,-	65,27
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.043.000,-	10.756.000,-	59,61
1.4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.043.000,-	10.756.000,-	59,61
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi	191.416.950,-	29.362.600,-	15,34

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

		Umum			
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.115.250,-	1.541.500,-	37,46
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0
1.5.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24.616.700,-	12.553.200,-	49,01
1.5.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6.480.000,-	3.240.000,-	50
1.5.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.165.000,-	2.675.000,-	43,39
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.040.000,-	9.842.600,-	6,56
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0	0	0
1.6.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	0	0	0
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.272.100,-	64.681.857,-	44,83
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,-	924.000,-	38,50
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35.000.000,-	12.179.357,-	34,80
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106.872.100,-	51.578.500,-	48,26

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	164.702.100,-	59.315.855,-	36,01
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107.227.250,-	52.071.885,-	48,56
1.8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17.489.000,-	7.244.000,-	41,42
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	39.985.850,-	0	0
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	317.680.300,-	228.629.500,-	71.97
2.2.	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dan menerima bantuan	317.680.300,-	228.629.500,-	71.97
2.2.1.	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	317.680.300,-	228.629.500,-	71.97
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya	754.558.170,-	387.035.890,-	51,29
3.2.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok usaha perikanan yang mengikuti pengembangan Kapasitas dan menerima bantuan	754.558.170,-	387.035.890,-	51,29
3.2.1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	754.558.170,-	387.035.890,-	51,29
3.2.4.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan			

Perubahan Renja Perikanan Tahun 2023

		Pelatihan			
--	--	-----------	--	--	--

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 2023

Dinas Perikanan merencanakan sebanyak 5 Program dengan besaran anggaran Rp. 5.761.225.450,-

2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2023

Dinas Perikanan pada tahun 2023 pada APBD murni melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 42 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.929.895.670,-

3. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Pergeseran Tahun 2023

Pada saat pergeseran Dinas Perikanan pada tahun 2023 tidak ada pergeseran anggaran, sehingga tetap melaksanakan 3 program, 9 Kegiatan dan 27

subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.116.599.968,-

4. Jumlah Subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran

Jumlah sub kegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dibanding APBD Pergeseran sebanyak 1 sub kegiatan.

5. Jumlah Subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran.

Tidak ada sub kegiatan yang berkurangnya pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

6. Jumlah Subkegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran.

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tidak ada subkegiatan baru yang muncul pada Renja Perubahan Tahun 2022

7. Jumlah Subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran.

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tidak ada subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2023

**BAB IV.
PENUTUP**

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Barat yang optimal.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2023 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan juga dengan para stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan perikanan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Barat,



Kamaludin, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19660405 198903 1 007

LAMPIRAN – LAMPIRAN